

PENGELOLAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN RAWA MAKMUR KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Liya Nur Padilah¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rawa makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *Library Research* dan *Field Work Research* yaitu wawancara langsung dengan informan, observasi, dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan untuk menentukan sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana teknik *purposive sampling* ini menentukan informan yang dianggap tentang Pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Analisis data dalam penelitian ini melakukan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyediaan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan program KOTAKU berdasarkan Fungsi Manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan cukup berhasil dapat dilihat pada berkurangnya tingkat kekumuhan di Kelurahan Rawa Makmur, terutama di RT 04. Namun dalam pengelolaan tersebut masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni kurangnya koordinasi dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *Pengelolaan, program, KOTAKU, jalan, bantaran sungai.*

Pendahuluan

Didalam setiap pembahasan pembangunan, kemiskinan selalu mendapat tempat yang cukup penting. Hal ini ditunjukkan dengan data ditjen cipta karya yang menunjukkan meningkatnya jumlah penduduk miskin di perkotaan Indonesia yang saat ini mencapai 10,67 juta orang pada tahun 2017, dan terdapatnya kawasan kumuh seluas 38.431 Ha. Angka ini bisa terus bertambah karena diperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 60%. Ketidak siapan kota-kota dalam menghadapi perkembangan ini akan menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh dan terbatasnya pelayanan dasar perkotaan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: liyanurpadilaah@gmail.com

Permukiman kumuh selalu menjadi masalah yang terdapat pada kota-kota besar di Indonesia, salah satunya Kota Samarinda. Permukiman kumuh ini umumnya dihuni oleh para penghuni desa atau dari kota yang lebih kecil yang sengaja berpindah/datang menetap di kota yang lebih besar untuk ikut bersama-sama di dalam kegiatan ekonomi kota dan biasanya merupakan dampak dari suatu perkembangan perekonomian yang begitu pesat dari suatu kota. Penanganan permukiman kumuh tidak bias dilakukan hanya untuk komponen tertentu, melainkan harus untuk seluruh komponen yang mewujudkan keterpaduan kawasan, dari aspek fisik lingkungan, ekonomi dan sosial.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan dengan melakukan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan ekonomi di kawasan pinggiran dan pedesaan. Dengan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa ASIA lainnya dengan membangun perumahan dan kawasan permukiman dengan fokus pada permukiman kumuh, pelayanan air minum, pelayanan sanitasi (air limbah, drainase, dan persampahan) keselamatan bangunan dan gedung, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur.

Maka pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan satu kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang Penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh. Menurut Surat Keputusan Walikota tersebut Kota Samarinda memiliki luas permukiman kumuh sebesar 539.18 Ha yang meliputi 9 kawasan diantaranya Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran yang memiliki luas wilayah kumuh sebesar 51,36 Ha yang mana di bantaran Sungai Mahakam dan kawasan pengembangan baru merupakan permukiman padat penduduk.

Keadaan tersebut yang menjadikan kawasan RT 04 menjadi semakin kumuh. Sebelum adanya program KOTAKU di Kelurahan Rawa Makmur bantaran sungai mahakam dan kawasan pengembangan baru merupakan daerah yang sangat kumuh yaitu sebanyak 40% kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai

sebanyak 19% bangunan hunian tidak memiliki keteraturan bangunan, yang mana banyaknya warga pendatang yang membuat bangunan hunian baru sehingga menjadikan kawasan tersebut semakin padat, kemudian adanya beberapa rumah warga yang tidak layak huni karna sudah tua dan sangat mengkhawatirkan jika dihuni. kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai, dapat dilihat dari banyaknya jembatan kayu yang mulai rapuh. saluran pembuangan air limbah rumah tangga tercampur dengan drainase lingkungan, karena masih banyak permukiman yang ada di pinggiran sungai tidak memiliki drainase. Sebanyak 30% kondisi jaringan drainase pada

lokasi permukiman memiliki kualitas buruk dan 85% kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

RT 04 merupakan kawasan yang memerlukan penataan, karena kumuh rawan banjir, dan kawasan permukiman yang mayoritas penduduk miskin yang perlu ditata bangunan dan lingkungannya. Munculnya program KOTAKU di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran pada tahun 2016 menjadi pendukung dalam terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dipimpin oleh Pemerintah dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Menurut koordinator kelembagaan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dengan adanya program KOTAKU kawasan permukiman kumuh yang semula 90% berkurang menjadi 30%. Namun pada kenyataannya masih banyak warga yang memiliki permasalahan permukiman kumuh seperti bangunan hunian yang masih tidak memiliki keteraturan, kondisi jaringan jalan permukiman memiliki kualitas yang buruk, kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai dan masih banyaknya permukiman yang tidak memiliki ketersediaan sarana/prasarana proteksi kebakaran. Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini sangat penting.

Kenyataan tersebut di atas, mendasari perlu adanya penelitian tentang pengelolaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas permukiman perkotaan.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam pengelolaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Aswin (2000:33) pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Easton dalam Tangkilisan (2003:2) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat

yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Carl J.Friedrich dalam Winarno (2002:16) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu yang diinginkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya.

Tahapan Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam dwidjowijoto (2007:22) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*) yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.
2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*) yaitu masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*) adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*). Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala.
5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*). Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Berdasarkan uraian diatas mengenai teori dan konsep dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses melaksanakan keputusan dan merupakan tindakan nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan dan hasil yang telah di tetapkan.

Manajemen

Menurut Stoner dan Freeman dalam Safroni (2012:44) Manajemen adalah proses perencanaan, Pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Balderton

dalam Adisasmita (2011:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Admosudirjo (2005:160) Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan tujuan tertentu.

Kemudian menurut George R. Terry dalam Hasibuan (2009:2) menjelaskan bahwa Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. maka dapat dipahami bahwa pengertian dasar manajemen adalah menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan menjadi satu rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan bersama segala sumberdaya untuk mencapai tujuan bersama.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis direktorat jenderal cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100 0 100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan dirjen cipta karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Menurut Surat Keputusan Walikota Samarinda nomor 413.02/028HK-KS tentang penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh yaitu bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya kawasan permukiman kumuh. Dan bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada

masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk menentukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran yang mendalam tentang pengelolaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Fokus penelitian yaitu:

1. Pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran berdasarkan 4 tahap yakni:
 - a) Perencanaan (*Planning*)
 - b) Pengorganisasian (*Organizing*)
 - c) Penggerakan (*Actuating*)
 - d) Pengawasan (*Controlling*)
2. Faktor-faktor penghambat dari Pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

Menurut Sugiyono (2009) Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikelompokkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: dokumen-dokumen tentang program KOTAKU di Kota Samarinda, buku-buku ilmiah, laporan, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kemudian cara untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode: (1) Penelitian Melalui Kepustakaan (*Library Research*) dan (2) Penelitian Langsung ke Lapangan (*Field Work Research*) terbagi menjadi 3 bagian yaitu (a) Wawancara atau *Interview*, (b) Observasi dan (c) Dokumentasi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.

Hasil Penelitian

Perencanaan

Perencanaan bermanfaat untuk mengarahkan kegiatan yang akan dilakukan masyarakat dalam organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya

untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Keberhasilan program KOTAKU ini juga harus didukung oleh semua pihak dan juga berdasarkan kondisi lingkungan. Setiap program yang di rumuskan tidak terlepas dari kondisi dan tujuan wilayah permukiman itu sendiri sehingga perlu adanya target dalam melakukan kegiatan apapun demi terlaksananya tujuan tersebut. Perencanaan merupakan penentuan secara matang dan cerdas tentang yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan program KOTAKU. Tahap-tahap yang direncanakan dalam program KOTAKU berupa mengumpulkan fakta dilapangan dengan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, dalam pengumpulan fakta tersebut dilakukan penilaian untuk mengetahui bahwa wilayah tersebut layak menerima bantuan program KOTAKU.

Pemilihan lokasi yang layak menerima bantuan program adalah wilayah yang ditinjau dari segi kondisi lingkungan yang kurang layak untuk dihuni karna termasuk kedalam kriteria perumahan kumuh. Kemudian menentukan jadwal kegiatan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi sangat berpengaruh besar dalam keberhasilan suatu program yang mana diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang benar akan makna dari program KOTAKU baik ditingkat masyarakat maupun pemerintah Kelurahan.

Langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam Sukarna (2011:10): “...Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

Perencanaan program KOTAKU ditentukan berdasarkan sasaran dan tujuan program dengan harapan semua potensi yang ada dapat di manfaatkan oleh seluruh masyarakat. Dalam perencanaan tersebut organisasi masyarakat akan mengerjakan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya suatu kegiatan program KOTAKU yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat dan kegiatan program KOTAKU tersebut mempunyai tujuan yaitu menciptakan tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dalam pelaksanaan program tersebut sangat dibutuhkan peran nyata dari seluruh masyarakat.

Perencanaan yang dilakukan dalam program KOTAKU merupakan upaya untuk memanfaatkan sumberdaya manusia yang dimiliki karena penyusunan program kerja akan lebih komprehensif jika dilakukan secara kolaborasi antara seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dilakukan untuk memberikan ruang dan penggalian potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Setiap pembangunan keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Tidak saja sebagai wujud pelaksanaan demokrasi tetapi agar hasil pembangunan yang dihasilkan tepat sasaran dan optimal bagi masyarakat. Karena

pada dasarnya yang menjadi objek dari program ini adalah seluruh masyarakat bukan hanya masyarakat miskin saja.

Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat tujuan yang harus dicapai dari program yaitu untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh diperkotaan dan untuk memberdayakan masyarakat. Perencanaan pengelolaan program KOTAKU melibatkan beberapa pihak yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat secara bersama, Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk mewujudkan kebijakan. Setelah adanya sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan agar dapat berpartisipasi aktif untuk mewujudkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tingkat kehadiran pada saat pelaksanaan sosialisasi. lokasi yang layak menerima bantuan dari program merupakan lokasi yang termasuk dalam perhitungan wilayah kumuh yang dinilai berdasarkan 7 indikator kumuh.

Dalam penetapan lokasi merupakan hal yang penting dalam memilih wilayah yang sesuai dengan kriteria kumuh. Kriteria karakteristik dalam pemilihan lokasi dilihat dari luas permukiman kumuh, kebutuhan akses terhadap infrastruktur dasar, penduduk, pelayanan dasar dan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan pada permukiman kumuh di perkotaan. Penilaian lokasi dilakukan untuk memastikan kondisi dan permasalahan dikawasan permukiman kumuh. Dengan adanya penilaian lokasi sehingga tim fasilitator dapat menentukan lokasi yang tepat untuk dilaksanakan program KOTAKU sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Pengorganisasian

Struktur organisasi merupakan susunan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengorganisasian sendiri membutuhkan koordinasi yang baik antar elemen didalamnya. Pengorganisasian program KOTAKU meliputi kegiatan menetapkan sumber daya manusia yang dilakukan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki masing-masing individu. Pembagian dan pengelompokan program KOTAKU pada masing-masing individu memungkinkan semua bagian dapat bekerja sesuai porsi yang sudah ditetapkan, sehingga setiap bagian dapat bekerja dengan fokus terhadap program yang harus dilakukan.

Kegiatan yang dilakukan selain pembagian kelompok kegiatan yaitu menentukan ketua LKM dan membentuk KSM. Pengorganisasian program juga melibatkan unsur masyarakat sekitar dengan harapan masyarakat akan ikut andil dalam pembangunan infrastruktur melalui program KOTAKU. Keikutsertaan masyarakat ditentukan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki

masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat tersebut dapat meningkatkan hasil pencapaian program.

Dalam pengorganisasian program KOTAKU Lurah memberikan fasilitasi terhadap jalannya program KOTAKU mulai dari sosialisasi sampai pengawasan, kemudian LKM merupakan koordinator pada saat penggerakan dalam hal ini LKM yang mengkoordinir KSM dan anggotanya dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Dan fasilitator sebagai pendamping LKM selama pelaksanaan program KOTAKU.

Pengorganisasian bertujuan untuk pembagian tugas dalam proses program KOTAKU agar lebih tepat sasaran, yang mana dalam pengorganisasian tersebut dilakukan pembagian kelompok KSM. Masing-masing KSM yang akan mengerjakan pembangunan infrastruktur. Pemilihan panitia pelaksana juga sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Prosedur pemilihan panitia dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh warga yang dapat dipercaya mampu menjalankan amanat yang telah diberikan. Masing-masing memiliki tugasnya sendiri. seperti ketua LKM yang sudah lama dipercaya oleh warga dalam berbagai macam pembangunan di masyarakat. Dalam hal tersebut ketua KSM serta anggota akan bertanggung jawab pada setiap pekerjaan yang dilakukan dan masing-masing KSM harus membuat laporan yang kemudian laporan tersebut diserahkan kepada ketua LKM untuk diserahkan kepada fasilitator program KOTAKU sebagai laporan pertanggung jawaban. Sejauh ini pengorganisasian antar masyarakat sudah berjalan dengan baik.

Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry dalam (Sukarna, 2011:38) yang mengatakan bahwa “Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan”. Jadi pengorganisasian sangat diperlukan, karena setiap jenis kegiatan memerlukan keterampilan yang berbeda, perlu pembagian tugas kepada setiap orang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Pelaksanaan semenisasi dan penurapan berbasis masyarakat dilaksanakan oleh kelompok Swadaya Masyarakat yang anggotanya ditentukan berdasarkan hasil pilihan dari masyarakat.

Dalam pengorganisasian program KOTAKU ini masing-masing elemen memiliki tugas yang berbeda-beda. Tugas pemerintah kelurahan berdasarkan arah kebijakan pembangunan dari dirjen cipta karya untuk membangun kotanya dengan memberikan dukungan dan jaminan agar program dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu Kelurahan juga memfasilitasi terselenggaranya pertemuan-pertemuan masyarakat dalam upaya penyebar luasan informasi atau sosialisasi dan pelaksanaan program. Tim

pelaksana dan relawan bertugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, mengelola dan melaksanakan kegiatan KOTAKU secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, menggerakkan masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan secara partisipatif dan memfasilitasi penyelesaian yang muncul di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik agar program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dan masyarakat dapat menuju satu arah yang harus dicapai bersama yaitu tujuan dari program KOTAKU.

Penggerakan

Penggerakan pada dasarnya merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan ruang lingkupnya cukup luas serta berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Langkah utama dalam melaksanakan penggerakan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Penggerakan dalam program KOTAKU meliputi memberikan bimbingan dan motivasi, instruksi, nasihat dan koreksi bagi berlangsungnya semua program yang direncanakan sehingga setiap program yang dijalankan tidak melenceng dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penggerakan pembangunan merupakan implementasi dari setiap rangkaian terkait perencanaan program yaitu mewujudkan visi misi masyarakat dan pemerintah dengan melakukan perbaikan infrastruktur. Setelah itu disusun dokumen perencanaan yang terintegrasi antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota hasil perencanaan tersebut menentukan kegiatan prioritas untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh yang baru.

Dalam proses penggerakan dalam program KOTAKU sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun diawal. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan. Dalam hal ini pada dasarnya untuk mewujudkan keberhasilan sebuah program maka penggerakan program bergantung pada peran pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan keberhasilan pada program KOTAKU.

Penggerakan program KOTAKU sangat membutuhkan keterlibatan dari masyarakat sebagai pelaksananya sendiri. Kegiatan rapat dalam program KOTAKU bertujuan untuk melakukan koordinasi kerja, saling berbagi informasi, meningkatkan kerjasama dalam tim, dan mencapai tujuan secara efisien. Kegiatan ini juga berguna untuk menentukan langkah yang tepat agar program berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena tentunya setiap daerah memiliki masalah dan penanganan solusi masing-masing yang berbeda antara daerah satu dengan yang lain.

Dalam program KOTAKU masyarakat yang menjalankan program dan yang memiliki peran besar dalam membangun wilayahnya sehingga masyarakat harus aktif dalam mewujudkan program untuk dirasakan manfaatnya oleh mereka sendiri. Masyarakat harus paham bahwa partisipasi mereka sangat diharapkan. dalam pelaksanaan di Kelurahan Rawa Makmur masyarakatnya cukup partisipatif dapat dilihat dari kemauan masyarakat untuk melakukan gotong royong selain dari bentuk tenaga juga dalam bentuk uang dan benda ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat sudah memahami dan menyadari dengan baik mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan program tersebut. Partisipasi masyarakat juga sudah terwujud dengan baik dilihat dari masyarakat yang ikut berpartisipasi membantu menyiapkan segala yang dibutuhkan selama proses pembangunan seperti menyiapkan konsumsi sampai membantu membebaskan lahan warga yang bermasalah. Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan pembangunan dapat dilihat dari kearifan masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan kontribusi seperti pendapat, kritik, dan saran sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan yang diharapkan.

Dalam proses penggerakan semua sudah berjalan baik hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan yang bisa diselesaikan tepat pada waktunya hal tersebut dikarenakan adanya dukungan dari pihak yang selalu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih giat lagi dalam bekerja agar keinginan masyarakat untuk memiliki permukiman yang layak huni dapat tercapai dan juga dapat berjalan dengan baik karena kegiatan program KOTAKU dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya.

Pengawasan

Pengawasan dalam program KOTAKU merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tersebut sasaran pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Kemudian untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional benar-benar dipergunakan dalam hal tersebut sudah sesuai. Pengawasan diperlukan untuk mengawasi peran dari personil yang sudah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab agar berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan program KOTAKU. Pengawasan juga diperlukan agar pelaksanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengawasan program KOTAKU dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan.

Pengawasan dalam program KOTAKU bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana program sudah dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Kemudian

untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi. Langkah yang dilakukan dalam proses pengawasan program KOTAKU yaitu dengan menentukan standar fisik agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan bersama. Langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi kinerja para pekerja dilapangan jika ditemukan ada penyimpangan atau kekurangan dalam pengerjaan pada saat pelaksanaan kegiatan maka akan dilakukan koreksi atau tindakan perbaikan sehingga jika terdapat penyimpangan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Dalam melakukan pengawasan pihak KOTAKU melihat dari dua aspek yaitu bukti fisik dilapangan dan laporan. Setelah program KOTAKU selesai masih ada pengawasan yang dilakukan oleh LKM guna memastikan bahwa masyarakat dapat merawat dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar lingkungannya tidak kembali menjadi lingkungan yang kumuh. Dalam proses pengawasan program KOTAKU selalu dilakukan pendampingan dan pemberian penjelasan rutin kepada pekerja agar pengerjaannya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Dalam hal ini pengawasan program KOTAKU sudah berjalan secara optimal hal tersebut sudah sesuai dengan teori menurut Reksohadiprojo (2006:63) Pengawasan pada hakekatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Dapat ditegaskan bahwa pengawasan merupakan kontrol terhadap kerja organisasi, baik menyangkut tugas perorangan maupun institusi.

Berbagai hasil pembangunan yang sudah tercapai dapat dilihat berhasil atau tidaknya, apabila manfaatnya dapat dirasakan oleh sasaran dan tujuannya tercapai sesuai dengan visi dan misi program. Meskipun manfaat tersebut belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan tujuan program, namun sudah dapat dikatakan berjalan cukup baik. Adapun manfaat itu berupa meningkatnya akses masyarakat, menurunnya jumlah lingkungan kumuh, serta perbaikan jalan yang ada di kelurahan Rawa Makmur. Adanya program KOTAKU di Kelurahan rawa makmur diharapkan hasil dari program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah lingkungan Kelurahan Rawa Makmur dan masyarakat sekitar dapat menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Perencanaan program KOTAKU yang diawali dengan melakukan peninjauan lokasi sesuai kondisi. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengentaskan permukiman kumuh perkotaan, Dalam peninjauan tersebut maka ditetapkan ada 2 jenis program yang akan dilaksanakan yaitu semenisasi jalan dan penurapan dibantaran sungai. Namun dalam proses perencanaan masyarakat yang hadir tidak sampai setengah dari jumlah keseluruhan yang diundang.
2. Pengorganisasian program KOTAKU diawali dengan pembentukan panitia seperti LKM dan KSM yang dipilih oleh seluruh ketua RT dan masyarakat. masing-masing memiliki tugas yaitu KSM pertama melakukan program

semenisasi jalan dan KSM kedua melakukan program penurapan pada bantaran sungai. Menurut data yang ada pekerja yang ikut melakukan program KOTAKU sebanyak 33 orang. Dalam hal ini pengorganisasian dapat dikatakan berhasil karna semua yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Penggerakan yang dilakukan dalam pengelolaan program KOTAKU dilakukan melalui pembangunan infrastruktur semenisasi jalan dan penurapan di bantaran sungai. Dalam pengerjaan tersebut fasilitator, LKM dan pihak kelurahan memberikan motivasi kepada pekerja. Tidak hanya memberi motivasi tetapi juga memberikan tugas dan penjelasan rutin kepada pekerja mengenai program KOTAKU. Namun dalam hal tersebut masih belum berhasil karna penurapan hanya dilakukan pada bantaran sungai didekat masjid dan tidak menyeluruh sampai kerumah warga.
4. Pengawasan program KOTAKU dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan. Pengawasan dilakukan oleh pihak fasilitator kelurahan (faskel), LKM serta pejabat dari kelurahan dan akan melakukan penilaian terhadap dua aspek yaitu bukti fisik di lapangan dan laporan. Dalam hal ini masih belum berjalan dengan baik karena masih ada masyarakat yang tidak menjaga lingkungannya agar tetap bersih.
5. Faktor yang menjadi penghambat dari program KOTAKU yaitu kurangnya koordinasi di dalam organisasi dalam mengkoordinir masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif untuk terlibat dalam proses pembangunan dan dalam menjaga lingkungannya agar tetap bersih.

Saran

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, maka diperlukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar masyarakat lebih sering menghadiri sosialisasi. Selain itu untuk menarik partisipasi masyarakat untuk hadir dalam sosialisasi maka pihak pelaksana harusnya memberikan kupon undian untuk dorprize agar masyarakat lebih bersemangat untuk hadir sosialisasi.
2. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang intensif yang dilakukan semua pihak yang terlibat baik pihak fasilitator, Lurah, LKM, dan KSM dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat selain itu juga pihak pelaksana harusnya memilih waktu yang tepat seperti hari libur agar masyarakat yang bekerja bersedia hadir pada saat sosialisasi. Kemudian diperlukan perluasan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat yang turut terlibat aktif dapat lebih banyak dan menyeluruh.

Daftar Pustaka

Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Admosudirdjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Rineka Cipta: Malayu.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Aswin. 2000. *Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam kebijakan dan pelayanan public*, Editor didimarzuki, pengantar, taufik effendi, MBA.
- Dwidjowijoto, Riant. N, 2007. *Analisis kebijakan.elek media komputindo*:Jakarta
- Hasibuan, Malayu. 20013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.BumiAksara.
- Miles, Matthew B,Huberman, dan Saldana J. 2014.*Qualitative DataAnalysis, A Methods Sourcebook*,Edition 3, USA: Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi.UI Press: Jakarta.
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Aditya Media Publishing: Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009.*MemahamiPenelitianKualitatif*.Alfabeta: Bandung.
- Tangkilisan. Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses KebijakanPublik*. Media Pressindo: Yogyakarta.